

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
DALAM MEMBINA PETUGAS PARKIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Ilmu Pemerintahan
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau

Bella Herma Yunita

NPM: 157310585

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarokatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena dengan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir”.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak diberikan bantuan dan masukan berupa waktu, tenaga, kritik, saran, kerjasama dan diskusi dari berbagai pihak yang membantu demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah dalam Skripsi ini. Penulis mengucapkan Terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H.Syafrinaldi, SH.,M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr.Moris Adidi Yogia,S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau,bersama wakil Dekan I
3. Bapak Budi Muliando,S.IP.,M.Si sebagai ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
4. Bapak Drs.H.Zaini Ali,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini

5. Bapak Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staff mengajar khususnya Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis
7. Terimakasih kepada Ayahanda Herizal dan Ibunda Ernalis tercinta, Abang , kakak memberikan doa, bantuan, semangat dan saran kepada saya
8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat sedari dulu yaitu Misra Liferny, Novira,winda,wadah, Ananda dan Teman berjuang Rici, Reka, Arliis, Istiana telah memberikan bantuan mulai dari awal hingga selesai

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWT dan semoga skripsi ini memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 28 November 2019
Penulis,

Bella Herma Yunita
Npm: 157310585

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
SURAT PERNYATAAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	10
1. Konsep pemerintahan.....	10
2. Konsep kebijakan.....	12
3. Konsep peranan.....	15
4. Konsep Pelayanan.....	18
5. Konsep pembinaan.....	20
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Pikir.....	26
D. Konsep Operasional	27
E. Operasional Variabel.....	29
F. Teknik Pengukuran	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe penelitian.....	32
B. Lokasi penelitian	32
C. Informat penelitian	33
D. Populasi dan Sampel	33
E. Jenis dan sumber data.....	34
F. Teknik pengumpulan data	34
G. Teknik analisis data.....	36
H. Jadwal kegiatan penelitian	36

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 38
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 41
C. Tugas dan Fungsi UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Perparkiran..... 42
D. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... 44

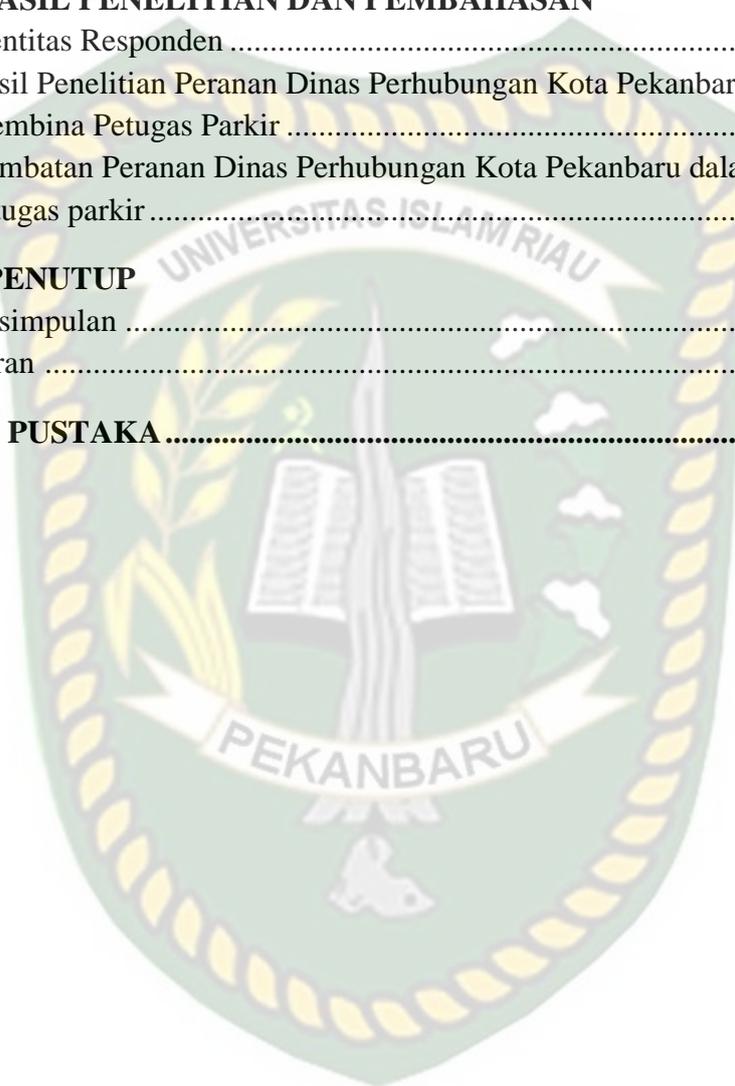
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden 56
B. Hasil Penelitian Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir 59
C. Hambatan Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam membina petugas parkir 76

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 77
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79



DAFTAR TABEL

Tabel II.I	Tabel penelitian Terdahulu	24
Tabel II.II	Tabel Operasional Variabel	29
Tabel III.I	Tabel Populasi dan Sampel	33
Tabel III.II	Tabel jadwal waktu kegiatan penelitian tentang peranan dinas perhubungan membina petugas parkir di Kota Pekanbaru.....	37
Tabel IV.I	Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan	40
Tabel V.I	Distribusi tingkat Pendidikan Responden	57
Tabel V.II	Jumlah Keseluruhan Responden berdasarkan Umur	58
Tabel V.III	Jumlah Keseluruhan Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
Tabel V.IV	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden petugas parkir mengenai bimbingan.....	60
Tabel V.V	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Masyarakat sebagai pengguna parkir mengenai bimbingan.....	62
Tabel V.VI	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Petugas Parkir mengenai pengawasan.....	65
Tabel V.VII	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Masyarakat sebagai pengguna Parkir pengawasan	66
Tabel V.VIII	Distribusi frekuensi jawaban responden petugas parkir mengenai pengarahan.....	68
Tabel V.IX	Distribusi frekuensi jawaban responden masyarakat sebagai pengguna parkir mengenai pengarahan	70
Tabel V.X	Distribusi Frekuensi jawaban responden petugas parkir mengenai pelatihan.....	72
Tabel V.XI	Distribusi frekuensi jawaban responden sebagai pengguna parkir mengenai pelatihan	73

Tabel V.XII Rekapitulasi Jawaban Responden Petugas Parkir mengenai Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir 74

Tabel V.XIII Rekapitulasi Jawaban Responden Petugas Parkir mengenai Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir 75



DAFTAR GAMBAR

- II.I Kerangka Pikir Penelitian Tentang Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir 27



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bella Herma Yunita
Npm : 157310585
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program studi : Strata Satu (S1)
Judul skripsi : Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat pada dasarnya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 November 2019
Pelaku pernyataan



Bella Herma Yunita

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM MEMBINA PETUGAS PARKIR

ABSTRAK

Bella Herma Yunita

Kata Kunci : Peranan, Membina,petugas parkir

Permasalahan penelitian ini belum maksimalnya Pelaksanaan teknis dilapangan mengakibatkan banyaknya terjadi pelanggaran terhadap sistem perparkiran. Pelanggaran tersebut dapat dilihat seperti sistem perparkiran yang kurang baik,petugas parkir yang tidak bertanggung jawab serta petugas parkir membiarkan pengguna parkir begitu saja dalam proses memarkirkan dan mengeluarkan kendaraannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam membina petugas parkir. Indikator penilaian membina petugas parkir yang dipergunakan meliputi bimbingan, pengawasan, pengarahan, dan pelatihan. Tipe penelitian yang digunakan Kuantitatif dan Kualitatif,berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bidang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran. Tujuan penelitian Untuk mengetahui peranan dinas perhubungan dalam membina petugas parkir di Kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam peranan Dinas Perhubungan dalam membina petugas parkir di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan yaitu Kualitatif dan Kuantitatif. Tipe penelitian yang berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagian Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu Kepala UPT Perparkiran berjumlah 1 orang, Regu 1 bagian pengawasan berjumlah 1 orang, Petugas Parkir berjumlah 24 orang serta masyarakat pengguna jasa parkir berjumlah 20 orang. Dua teknik sampling yang dipergunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik sensus untuk populasi petugas parkir dan teknik insidental sampling untuk kelompok populasi masyarakat. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisioner Dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Berdasarkan hasil peneliti lakukan mengenai peranan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam membina petugas parkir berada pada penilaian interval penilaian Cukup Baik.

THE ROLE TRANSPORTATION OFFICE OF PEKANBARU IN DEVELOPING PARKING ATTENDANTS

ABSTRACT

Bella Herma Yunita

Keywords: Role, Fostering, parking attendants

The problem of this research is that the technical implementation in the field has not been maximized resulting in many violations of the parking system. The violation can be seen as a poor parking system, irresponsible parking attendants and parking officers simply let the parking users in the process of parking and removing their vehicles. This study aims to determine how the role of the Pekanbaru transportation agency in fostering parking attendants. The assessment indicators of parking officers used include guidance, supervision, direction, and training. The type of research used is Quantitative and Qualitative, located in the Transportation Department of the City of Pekanbaru in the Parking Technical Implementation Unit (UPTD) of Parking. The purpose of this study was to determine the role of the transportation department in fostering parking attendants in Pekanbaru City and to determine the obstacles in the role of the Department of Transportation in fostering parking attendants in Pekanbaru City. The method used is qualitative and quantitative. The type of research that is located in the Pekanbaru City Transportation Department as the Technical Implementation Unit (UPTD) of Parking is a descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool. There are two population groups and samples in this study, namely the Head of UPT Parking with 1 person, 1 team with 1 supervision, 1 person with Parking and 24 people, and 20 people using parking services. Two sampling techniques used in determining individual samples are census techniques for parking attendant populations and incidental sampling techniques for population groups. Types and data collection techniques used consist of, primary data collected using questionnaire and interview techniques and secondary data collected using observation techniques. Based on the results of researchers doing about the role of the Pekanbaru city transportation department in fostering parking attendants are in the assessment interval Good Fair.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk menjalankan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia dibagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi ke dalam kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut

dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan Pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan tugas dan wewenang pemda, maka dikeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pada 9 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat.

- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan Pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
- d. Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri dari :
1. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
 - d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
 - e) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - f) Sosial
 2. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :
 - a) Tenaga kerja
 - b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c) Pangan
 - d) Pertanahan

- e) Lingkungan hidup
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g) Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i) **Perhubungan**
- j) Komunikasi dan informatika
- k) Koperasi, Usaha kecil dan menengah
- l) Penanaman modal
- m) Kepemudaan dan olah raga
- n) Statistik
- o) Persandian
- p) Kebudayaan
- q) Perpustakaan, dan
- r) Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang diatas maka masalah perpajakan termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perhubungan. Diserahkannya urusan tersebut pada daerah agar pemerintah daerah dan rakyat daerah dapat tumbuh dan berkembangnya perekonomian dan perdagangan didaerah melalui sektor wirausaha sehingga mampu mendorong bergeraknya perekonomian secara terkoordinasi dan terpadu.

Kota pekanbaru merupakan salah satu kota terbesar diprovinsi Riau dan yang berkembang pesat. Kota Pekanbaru memiliki slogan yaitu “Kotaku, Kotamu dan Kota kita bertuah” seiring berjalannya waktu, Pekanbaru Kota bertuah sudah

beganti dengan Pekanbaru Kota Madani, sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan walikota Pekanbaru. Kota pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 58 kelurahab, dengan luas 632,26 Km². Hal ini juga berdampak pada pusatnya jalur kendaraan dan lau lintas dikota ini.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru pada pasal 1 ayat (13) menyebutkan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Ayat (14) menjelaskan bahwa juru parkir adalah orang yang berhak melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir yang ditunjuk oleh Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Setiap juru parkir yang telah ditunjuk oleh Dinas sudah memiliki tempat parkir, pada ayat (15) dijelaskan bahwa tempat parkir ditepi jalan umum adalah failitas parkir kendaraan ditepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian yang memang mengurus masalah perparkiran pada dinas perhubungan Kota Pekanbaru adalah UPTD(Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Perparkiran. Parkir sudah menjadi kebutuhan dan terdapat hampir diseluruh ruas jalan dikota pekanbaru. Sedangkan bidang yang khusus untuk mengatur perparkiran pada dinas ini adalah UPTD(Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Perparkiran.

Pada tahun 2017 terdapat 122 ruas jalan di Kota Pekanbaru yang diizinkan untuk menjadi lokasi parkir dengan jumlah lokasi yang terdata atau yang memiliki izin sebanyak 199 lokasi (Data Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru). Tetapi untuk

jumlah titik parkir yang melanggar aturan tidak ada di Kota Pekanbaru, pihak Dinas Perhubungan tidak memiliki data tersebut dikarenakan belum adanya pihak dinas perhubungan yang melakukan survey, tetapi hanya melakukan pembinaan dan tindakan langsung. Adapun titik parkir yang ada di Kota Pekanbaru dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1 Tabel Petugas Parkir dan titik Lokasi di Kota Pekanbaru

No	Lokasi	Jumlah Koordinator	Jumlah Juru parkir
1.	Jalan Jend. Sudirman	12 orang	115 orang
2.	Jalan Arifin Ahmad	3 orang	14 orang
3.	Jalan Hangtuah	10 orang	38 orang
4.	Jalan HR Subrantas	4 orang	41 orang
5.	Jalan Tuanku Tambusai	6 orang	24 orang
6.	Jalan KH Nasution	6 orang	21 orang
7.	Jalan Ahmad Yani	5 orang	24 orang
8.	Jalan Riau	3 orang	45 orang
9.	Jalan Sekolah	1 orang	20 orang
10.	Jalan Durian	2 orang	24 orang
11.	Jalan Adi sucipto	3 orang	15 orang
12.	Jalan Soekarno Hatta	4 orang	25 orang
13.	Jalan Yos Sudarso	2 orang	18 orang
14.	Jalan Kuantan Raya	1 orang	7 orang
15.	Jalan Kartama	4 orang	20 orang
16.	Jalan Kartini	2 orang	14 orang
17.	Jalan Ronggowarsito	2 orang	12 orang
18.	Jalan Teratai	3 orang	21 orang
19.	Jalan Rumbai	5 orang	30 orang

Sumber : Dinas Perhubungan bagian UPT Perparkiran, 2017

Pembinaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran dan potensi yang dimiliki. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada petugas parkir, kewajiban dan tanggung jawab yang pada akhirnya meningkatkan pelayanan petugas parkir kepada pengguna jasa parkir tepi jalan, serta terciptanya ketertiban dan keamanan di setiap satuan ruang parkir. Diadakannya pembinaan ini diharapkan petugas parkir bisa melayani masyarakat dengan baik-baiknya serta memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pengguna jasa parkir.

Peran pemerintah untuk andil dalam penyelenggaraan pelayanan parkir memiliki dampak yang besar dalam mensukseskan pelayanan parkir yang baik. Didalam pelaksanaan parkir dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 dinas perhubungan wajib melakukan pembinaan terhadap juru parkir dan penataan parkir. Adapun pembinaan yang dimaksud ialah :

1. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir
3. Meningkatkan kedisiplinan kepada juru parkir

Pada penelitian ini peneliti fokus pada lokasi parkir sepanjang jalan Tuanku Tambusai dengan alasan bahwa dari beberapa titik parkir tersebut paling banyak juru parkir dan masih kurang tertib.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap pembinaan petugas parkir, ditemukan fenomena yaitu :

1. Pelaksanaan tugas yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam bidang pembinaan terhadap parkir ditepi jalan umum masih sangat lemah.
2. Pelaksanaan teknis dilapangan yang belum maksimal mengakibatkan banyaknya terjadi pelanggaran terhadap sistem perparkiran. Pelanggaran tersebut dapat dilihat seperti sistem perparkiran yang kurang baik, petugas parkir yang tidak bertanggung jawab serta petugas parkir membiarkan pengguna parkir begitu saja dalam proses memarkirkan dan mengeluarkan kendaraannya.
3. Masih banyaknya petugas parkir yang tidak mengetahui dimana zona perparkiran yang layak untuk digunakan sebagai tempat parkir.

B. Rumusan Masalah

Parkir ialah salah satu bentuk retribusi yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah, maka dari itu pemerintah daerah khususnya Kota khususnya dinas perhubungan harus dapat membina petugas parkir dengan cara memberikan pengarahan kepada petugas parkir, bimbingan kepada petugas parkir sehingga dapat terlaksanakan semaksimalnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai bukti “**Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir ?**”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui peran dinas perhubungan Kota Pekanbaru dalam membina petugas parkir.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam membina petugas parkir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi :

- a. Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan memacu perkembangan ilmu pemerintahan minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang pemerintahan, khususnya dibidang pembinaan pemerintahan
- b. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- c. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pejabat struktural pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam membina

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah dan diakhir ditambah “an” yang menjadi pemerintahan, karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal atau ihwal pemerintahan itu sendiri. Syafiie (2011:4). Adapun menurut Ndraha (2011:5) pemerintahan adalah system multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, sedangkan menurut Apeldooren dalam (Supriyanto, 2009:22-23) “Pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat Utrecht sebagai berikut :

- a. Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata luas. Jadi, yang meliputi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan dalam pengertian ini disebut Penguasa.
- b. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu Negara. Contohnya Raja, Presiden, Perdana Menteri dan lain-lain.
- c. Pemerintah sebagai organ eksekutif dalam arti kepala negara bersama-sama dengan menteri-menterinya.

Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan unsur-unsur dinas, memimpin serta menyelidiki berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang berkepentingannya diwakili oleh dinas itu. Musanef (dalam Syafiie, 2011,8)

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti studi tentang penunjukkan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Dari penjelasan tersebut Ilmu Pemerintahan merupakan Ilmu yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi pemerintahan dalam melakukan kerja kedalam dan keluar. Rosenthal (dalam Syafiie, 2009:21)

Sehingga dilihat dari defenisi diatas bahwa ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksanaan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh Pemerintahan adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan publik sebagai suatu aturan dalam kegiatan masyarakat.

Selanjutnya Awang dan Wijaya (2012:6) pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau Lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Istilah pemerintah dan pemerintahan menurut Awang dan Wijaya (2012:6) mengandung perbedaan arti. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut, yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis dan bersifat dinamis. Tugas dan fungsi pemerintah terdiri dari 4 yaitu fungsi

pemberdayaan, pembangunan, pelayanan dan pengaturan, yang mana keseluruhan fungsi tersebut dilakukan melalui fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan publik.

2. Konsep Kebijakan Publik

a. Pengertian

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Banyak pakar menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Tidak ada suatu organisasi yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Dapat dilihat bahwa kebijakan publik merupakan pilihan-pilihan bagian dari perencanaan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk keputusan yang mana dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang tertentu yang menyangkut tugas-tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas dan lain-lain.

Menurut Suharto (dalam Zaini Ali, 2015:4) kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan sedangkan menurut Heinz Eulan dan Kenneth Prewit mengatakan bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya.

Kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Koryati (2005:7)

Dye (dalam Agustino, 2008:7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kemudian menurut Indiahono (2009:18) kebijakan publik dalam rangka Substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi.

Sehingga dapat diketahui bahwa keseluruhan tugas dan fungsi maupun wewenang yang dimiliki dan akan dilakukan oleh pemerintah ialah selalu melalui kebijakan publik, kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan dinas dan lain-lain.

Kemudian menurut Syafiie (2006:104) menjelaskan kebijakan publik adalah semacam jawaban suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya, menjadi pengatur inovasi dan pemuka terjadinya kebikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Sehingga dapat diketahui kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Menurut Nugroho (2006:23-25) dapat dirumuskan pemahaman mengenai kebijakan publik, yaitu :

- a. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator Negara, dan administrator publik, jadi kebijakan publik merupakan sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.
- b. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua domain yang ada lembaga administrator publik.

Kebijakan publik mengatur masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu.

- c. Dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.

Selanjutnya menurut Nasuca (dalam Pasolong, 2008:39) menyatakan kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum.

a. Ciri-ciri Kebijakan

Menurut Dunn (dalam Budi Winarno, 2002:53-54) mengemukakan bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan yaitu :

1. Subyektivitas, kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Masalah kebijakan adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu.
2. Saling ketergantungan, masalah-masalah kebijakan dalam suatu bidang (misalnya energi) kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah kebijakan dalam bidang lain (misalnya, pelayanan kesehatan dan pengangguran)
3. Sifat buatan, masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia berbuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi. Masalah kebijakan adalah hasil penelitian subyektif manusia, masalah kebijakan itu juga diteima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi

sosial obyektif dan masalah kebijakan dipahami dipertahankan dan diubah secara sosial.

4. Dinamika masalah kebijakan. Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan memecahkan suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah-masalah tersebut.

3. Konsep Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peranan adalah orang atau sesuatu yang menjadi bagian dari suatu masalah atau peristiwa, selain itu peranan juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu dimana suatu peristiwa. (Poerwadarminta, 2005:854) kemudian secara umum peranan diartikan sebagai bagian atau keikutsertaan.

Peranan adalah konsep tentang apa saja yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang paling penting bagi struktur masyarakat sosial. Soekanto (2001:269) Peranan ini mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang menimbang seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*Status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu Peranan (dalam Sokanto, 2001:268).

Selanjutnya menurut Susanto (dalam Soekanto, 2001:94) peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun disebut status objektif. Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Dan masih dalam buku yang sama Levy (dalam Soekanto, 2001:272), pentingnya pembahasan peran yang melekat pada individu dalam masyarakat:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan keberlangsungannya.
2. Peran tersebut hendaknya dilekatkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat yang mampu melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang sering dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana yang telah diharapkan oleh masyarakat.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto,2002). Menurut Ndraha (2003:53) peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan atau ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan. Selain itu Wibawa (2008:81) mengatakan bahwa peranan adalah keseluruhan hubungan dan perilaku seseorang terlihat dari fungsinya terhadap

organisasi. Beberapa dimensi peranan menurut (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003) sebagai berikut :

1. Sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Sebagai strategi. Penganut paham ini mengendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*Public Supports*).
3. Sebagai alat komunikasi. Peran ini didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
4. Sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapatan-pendapatan yang ada.
5. Peran sebagai terapi. Peran ini dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat.

Sehingga dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan adalah suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu individu atau organisasi dan diharuskan melakukan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Konsep Pelayanan

Soetopo mendefinisikan pelayanan sebagai “suatu usaha membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain (dalam Napitupulu,2012;164). Dari batasan tersebut bahwa pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain. Secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah cirri seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.

Pelayanan merupakan salah satu kata kunci yang akan selalu memberi motivasi dan kesadaran akan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang mendahulukan kewajiban dari pada hak, pelayanan harus memberikan kesediaan rela berkorban untuk Negara dan masyarakat. Hal ini perlu dipegang teguh dalam melaksanakan tugasnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara meteril dan spiritual yang kemudian memperlancar urusan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut sadu wasistiono pengertian pelayanan umum atau pelayanan public adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. (dalam azhar,2017:23)

Kelambanan pelayanan umum tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan. Ternyata masih banyak faktor yang mempengaruhi begitu buruknya tata kerja dan birokrasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dikantor-kantor pemerintah kita akan banyak melihat pegawai yang datang kekantor hanya

untuk mengisi absensi, mengikuti apel pagi dan apel siang, sementara pekerjaan yang diselesaikan harus tepat produktivitas.

Pada dasarnya dibentuknya suatu pemerintahan bertujuan untuk menjaga suatu sistem. Hakikatnya pemerintahan modern adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidaklah untuk melayani diri sendiri atau orang-orang tertentu melainkan untuk melayani masyarakat, sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan karena itu merupakan proses yang berlangsung terus menerus. Pelaksanaan pelayanan itu dapat diukur, serta dapat diterapkan standar baik atau buruknya. Dengan adanya standar dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, agar supaya hasil akhir memuaskan pada pokok-pokok yang dilayani.

Moernir (1997:16) mengatakan pelayanan pemerintahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya.

Adapun pelayanan public berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public tepatnya pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public,

Pelayanan public menurut peraturan Menteri penyalahgunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan public, yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dengan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayan public.
2. *Standar pelayanan* adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

5. Konsep Pembinaan

a. Pengertian

Kata pembinaan diambil dari kamus besar bahasa indonesia sendiri yaitu usaha, tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat dan mendapatkan manfaat uang positif. Pembinaan adalah sebuah proses dan tujuan sebagai proses pembinaan kelompok didalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pembinaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dengan perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun

sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut wiranto (1999:45) pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kepastian masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi dan produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Menurut Effendi (2003:24) mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih Baik.

Selanjutnya Effendi (2003:25) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan bentuk antara lain :

a. Bimbingan

Crow (dalam Pasla, Skripsi Ilmu Pemerintahan, 2013:22) bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada suatu individu melalui pendidikan dan petunjuk agar yang diberikan bimbingan dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan persoalan-persoalan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

b. Pengawasan

Siagian (dalam Pasla, Skripsi Ilmu Pemerintahan, 2013:22) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

c. Pengarahan

Pengarahan yaitu kegiatan untuk menggerakkan orang lain supaya bisa dan dapat bekerja dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, memberi masukan kepada anggotanya sehingga dapat menunjang tingkat pengetahuannya.

d. Pelatihan

Gomes (dalam Pasla, Skripsi Ilmu Pemerintahan, 2013:22) pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawab atau yang ada kaitan dengan pekerjaannya.

b. Tujuan Pembinaan

Konsep pembinaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup arah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Adapun tujuan umum pembinaan sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat
2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan rasionalnya
3. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dengan manajemen yang baik (pemimpin)

Tujuan pembinaan menurut Nurcholis yaitu:

- a). Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna

- b). Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja
- c). Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945 dan Negara
- d). Ditunjukkan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi
- e). Diarahkan pada penyaluran, penyebaran dan manfaat pegawai
- f). Diarahkan pada pembinaan sistem karier dan pembinaan prestasi kerja

c. Fungsi pembinaan

Ada beberapa fungsi pembinaan yang akan diarahkan dengan baik yaitu :

1. Menumpuk kesetiaan dan ketaatan.
2. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.
3. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
4. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan beribawa
5. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan berkembangnya organisasi yang akan ditentukan.

d. Tahap pembinaan

Menurut Sumodiningrat (1997:72) tahap proses pembinaan sebagai berikut:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kepastian diri
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

B. Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	2	3	4
1.	Kualitas Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Kota Yogyakarta (Abdiana Ilosa, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan parkir ditepi jalan umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode deskriptif kualitatif • Faktor-faktor kualitas pelayanan
2.	Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pengelolaan dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Studi Pada Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda) (Maisyarah dkk, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian pembinaan terhadap Petugas Parkir 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode deskriptif Kualitatif • pemantauan dari dinas perhubungan kota samarinda 2 hari sekali • memeriksa tenanga/juru parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung

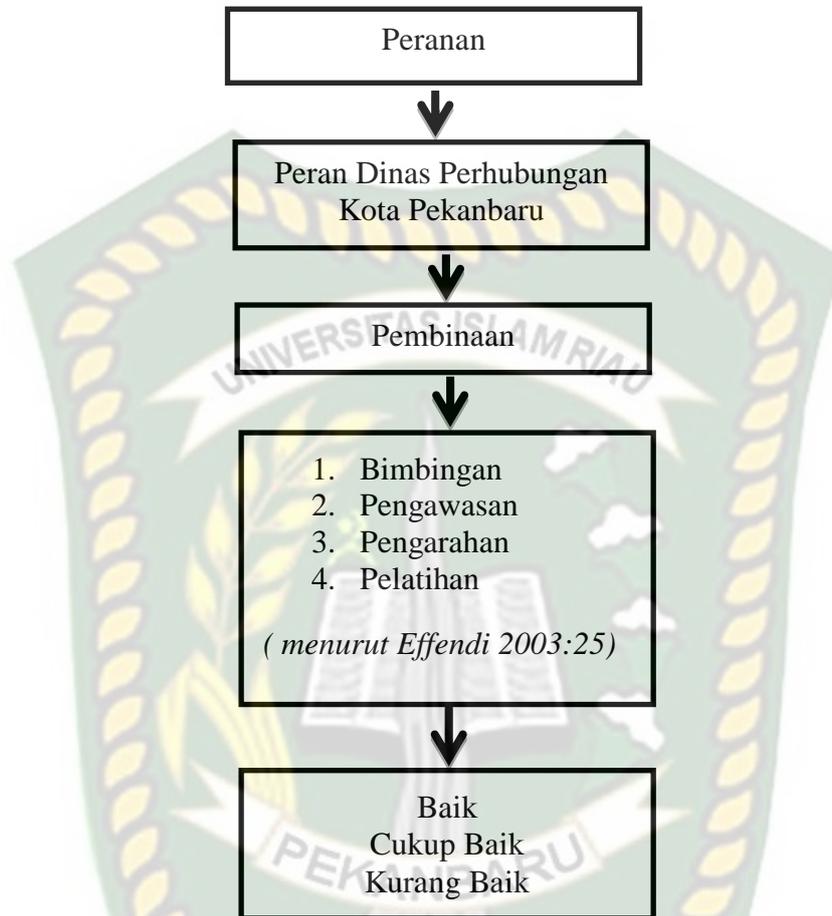
			jawab atas usaha.
3.	Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan UPTD Parkir Sub Unit tepi Jalan dalam Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Surabaya.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang Berperannya Pemerintahan khususnya Dinas Perhubungan Sebagai Pihak yang bertanggung jawab • Tidak adanya kejelasan zona perparkiran dari UPTD Parkir 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada Pengawasan atau Kontrol. Pelaksanaan Pemungutannya • Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif
4.	Implementasi Kebijakan pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum • Ketersediaan sarana dan prasarana parkir kurang memadai, hal ini disebabkan belum adanya lokasi dikhususkan untuk parkir 	<ul style="list-style-type: none"> • Berfokus pada Implementasi kebijakan pelayanannya • Metode deskriptif Kualitatif
5.	Peranan UPTD pengelolaan parkir dinas perhubungan dalam penataan parkir dipasar pagi kota samarinda. (Tigawati,2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tidak teraturnya penataan parkir 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian yang digunakan analisis data kualitatif • Evaluasi pengoperasian fasilitas perparkiran sedangkan pada penelitian saya belum adanya pengoperasian

			fasilitas perparkiran.
6.	Studi tentang peranan dinas perhubungan dalam menertibkan parkir liar dipasar pagi kota samarinda. (Pri Guna Nugraha,2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Menertibkan petugas parkir dan juru parkir 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sedangkan penelitian saya menggunakan teknik Sampling

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan variabel penelitian “Peran Dinas Perhubungan membina petugas parkir di Kota Pekanbaru”. Kemudian diukur dengan teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan unsur-unsur peranan Dinas perhubungan dalam pembinaan perparkiran di Kota Pekanbaru dalam gambaran alur penelitian yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar. II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Peranan Dinas Perhubungan membina petugas parkir di Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi dari sejumlah dasar teoritis

D. Konsep Operasional

Untuk memeperjelas konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penulis ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikator yakni sebagai berikut :

1. Peranan adalah tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang dalam masyarakat sebagai organisasi
2. Pembinaan adalah suatu usaha meningkatkan pengetahuan anggota dari suatu organisasi untuk melakukan kegiatan meliputi perencanaan, pengarahan, pengembangan dan pengendalian.
3. Perparkiran merupakan sub sistem dari lalu lintas jalan, parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, tempat parkir ditepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan dilokasi tertentu ditepi jalan umum diwilayah daerah.
4. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada suatu individu melalui pendidikan dan petunjuk agar yang diberikan bimbingan dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan persoalan-persoalan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.
5. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
6. Pengarahan ialah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuai kegiatan usaha.
7. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawab atau yang ada kaitan dengan pekerjaannya.

E. Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	pengukuran
1	2	3	4	5
Peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator setiap jenjang/ pemerintahan (<i>menurut Taliziduhu Ndraha, 2003, kybernologi</i>)	Pembinaan	1. Bimbingan	a. pemberian petunjuk b. pemberian masukan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. pengawasan	a. menentukan ukuran/pedoman b. mengawasi kegiatan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. pengarahan	a. menggerakkan/arahan b. memberi langkah-langkah	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. pelatihan	a. meningkatkan kemampuan b. meningkatkan keterampilan	Baik Cukup Baik Kurang Baik

sumber: olahan penelitian, 2019

F. Teknik Pengukuran

1. Ukuran variabel penelitian, yakni :

Berperan : Apabila keseluruhan indikator dari pembinaan terhadap petugas parkir berjalan dengan baik atau jawaban responden berada pada kategori baik sebesar 67-100%.

Cukup Berperan : Apabila 2-3 indikator dari pembinaan terhadap petugas parkir berjalan cukup baik atau jawaban responden berada pada kategori sebesar 33-66%.

Kurang Berperan : Apabila hanya 1 dari pembinaan petugas parkir berjalan kurang baik atau kurang terbina jawaban responden berada pada kategori sebesar 0-33%.

2. Ukuran Indikator Variabel Penelitian, yakni :

a. Memberikan Bimbingan, pengukurannya adalah :

Baik : Apabila Bimbingan yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 67-100%.

Cukup Baik : Apabila Bimbingan yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 34-66%.

Kurang Baik : Apabila Bimbingan yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 0-33%.

b. Memberikan Pengawasan, pengukurannya adalah :

Baik : Apabila pengawasan yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 67-100%.

Cukup Baik : Apabila pengawasan yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 34-66%.

Kurang Baik : Apabila pengawasan yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 0-33%.

c. Memberikan pengarahan, pengukurannya adalah :

Baik : Apabila Pengarahan yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 67-100%.

Cukup Baik : Apabila Pengarahan yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 34-66%.

Kurang Baik : Apabila Pengarahan yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 0-33%.

d. Memberikan Pelatihan, pengukurannya adalah :

Baik : Apabila Pelatihan telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 67-100%.

Cukup Baik : Apabila Pelatihan telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 34-66%.

Kurang Baik : Apabila Pelatihan telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 0-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sehingga dapat diketahui metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu objek penelitian dengan tujuan mendapatkan sesuatu dengan cara yang sistematis.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Yang mana melakukan penelitian langsung kelapangan untuk mendapatkan gambaran yang tepat. Jelas dan terperinci sebagaimana permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti. Kemudian metode ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:14) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dan tujuan untuk menguji Hipotesis yang ditetapkan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian ini ialah berada di Kantor Dinas Perhubungan UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru, lokasi penelitian ini dipilih karena Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi dalam membina petugas

parkir di Kota Pekanbaru, adapun yang menjadi objek penelitian yaitu lokasi penelitian peparkiran di sepanjang jalan Tuanku Tambusai/ Nangka.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah dua bentuk yang berbeda namun didalam hal yang membedakannya adalah menurut Usman dan Akbar (2011;42) menyatakan populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif ataupun kualitatif, dari pada karaktertif tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas, populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh regu dinas perhubungan Kota Pekanbaru bagian pengawas dan pembinaan.

Sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling (Usman dan Akbar, 2011;43) yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah regu di dinas perhubungan Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.1 Populasi dan Sampel

No.	Nama populasi	Populasi	Sampel	persentase
1.	Kepala UPT Perparkiran	1	1	100%
2.	Regu 1 (Pengawasan)	1	1	100%
3.	Petugas Parkir	24	20	83%
4.	Masyarakat pengguna jasa paker	∞	24	-
Jumlah		-	46	82%

Sumber : Data Olahan peneliti, 2019

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Merupakan data yang diambil secara langsung dari lokasi penelitian melalui tanya jawab langsung kepada responden tentang peranan dinas Perhubungan Membina Petugas Parkir di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber pendukung lainnya yaitu seperti buku, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan Peranan Dinas Perhubungan Membina Petugas Parkir di Kota Pekanbaru.

Adapun data sekundernya, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum
- c. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanggung

jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti (Singarimbun, 2005: 192). Wawancara dilakukan kepada Kepala UPT perparkiran dan TU UPT perparkiran serta petugas parkir.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner yang diajukan menyangkut tentang Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir. Kuisisioner ini nantinya akan disebar dan dijawab oleh responden yang terpilih dalam penelitian ini, hasil jawaban responden ini selanjutnya akan direkap untuk dilakukan pembahasan sesuai dengan masing-masing indicator sehingga nantinya akan didapat hasil akhir kesimpulan ini.

3. Observasi

Pengamatan secara langsung kelokasi penelitian, terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari pengamatan secara langsung mengenai lokasi parkir.

4. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan/ pengembalian dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan lokasi penelitian keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biaya tarif yang relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya adalah data yang diambil dari dokumentasi cenderung

sudah lama dan kalau ada yang salah cetak maka meneliti ikut salah pula dalam peroleh pengembalian datanya.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan analisis data dalam penelitian menggunakan teknik kualitatif yaitu data informasi yang berbentuk kalimat variabel dan data kualitatif dapat diperoleh melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan dapat diperoleh secara langsung (lapangan) yang akan dikumpulkan sesuai dengan indikator penelitian serta diuraikan untuk menarik kesimpulan.

Menurut Nanang Martono (2016:11) penelitian Kualitatif adalah data dalam bentuk rekaman hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun Perincian rencana jadwal waktu kegiatan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dari Minggu Ke-															
		Juni 2019				September 2019				Oktober 2019				November 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian	x															
2.	Seminar usulan penelitian				X												
3.	Riset					X											
4.	Penelitian Lapangan									x	x	x	x				
5.	Pengolahan data dan analisis data											x	x	x			
6.	Konsultasi bimbingan skripsi														x	x	
7.	Ujian Skripsi																X
8.	Revisi dan pengesahan skripsi																X
9.	Penggandaan serta penyerahan skripsi																X

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum kota pekanbaru

Perkembangan kota pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi minangkabau wilayah pesisir selat malaka. Pada abad ke-18, wilayah senapelan ditepi sungai siak, menjadi pasar (*pecan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi minangkabau. Seiring berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari kesultanan siak, yang terdiri dari datuk empat suku minangkabau (Pesisir, limapuluh, tanah datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.indonesia.com.pekanbaru>)

Berdasarkan *besluit van het inlandsch zelfbestuur van siak* No.1 tanggal 19 oktober 1919, pekanbaru menjadi bagian distrik dan kesultanan siak. Namun pada tahun 1931, pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar kiri yang dikepalai oleh seseorang *controleur* yang berkedudukan dipekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota *onderafdeling Kampar kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan jepang pada tanggal 8 maret 1942, pekanbaru dikepalai oleh seseorang gubernur militer yang disebut *Gokung*. (<http://wikipedia.indonesia.com.pekanbaru>)

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak ditengah-tengah pulau sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari manapun menuju kota-kota lain. Dengan bujur timur yang terletak pada titik 101-36 dan 0-35 Lintang utara, menjadikan pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>).

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1987 luas kota pekanbaru dikembangkan dari 62,96 km dengan 8 kecamatan, 36 kelurahan dan 9 desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan dipekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu terdiri dari kecamatan payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan tampan, kecamatan tenayan raya dan marpoyan damai yang merupakan pemekaran dari kecamatan bukti raya, kecamatan rumbai pesisir yang merupakan pemekaran dari kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota pekanbaru mencapai 632,36 Km². Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan didaerah kota pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (KM)	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2.	Senapelan	6,65	1,05
3.	Sukajadi	5,10	0,81
4.	Limapuluh	4,04	0,64
5.	Sail	3,26	0,52
6.	rumbai	105,23	16,64
7.	Rumbai Pesisir	96,75	15,30
8.	Bukit Raya	94,56	14,96
9.	Tenayan Raya	108,84	17,21
10.	Marpoyan Damai	89,86	14,21
11.	Tampan	63,08	9,98
12.	Payung Sekaki	52,63	8,32
Jumlah		632,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari uraian diatas terlihat bahwa kecamatan terluas didaerah kota pekanbaru adalah kecamatan Km². Sedangkan kecamatan terkecil dan tersempit adalah kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayahnya 2,26 Km.

Dengan jumlah penduduk kota pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka diperlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal tetapi didalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk kota pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan. Pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini

terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah sekitar 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan surat keputusan menteri perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat disektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru sebagaimana yang teryuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kemudia adanya UU No.22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah Perda No. 7 Tahun 2001 membuat dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU No. 32 Tahun 2004 serta PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No.8 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama Dinas ini menjadi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru.

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian visi Kota Pekanbaru 2020, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota pekanbaru memiliki Visi, Misi, Tujuan, sasaran serta Arah kebijakan. Visi Dinas Perbungan (Dishub) Kota Pekanbaru adalah *“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa*

Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang Lengkap, Menyeluruh, Handal dan Terjangkau”.

Visi ini mempunyai makna Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru akan berusaha melaksanakan tugasnya agar tercapainya keinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Kota Pekanbaru serta selalu berkoordinasi dengan dinas instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah Kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, maka Misi tersebut dijabarkan menjadi empat buah Misi yaitu :

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM Perhubungan yang berkualitas dan Profesional
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

C. Tugas dan fungsi UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas)

Berdasarkan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perparkiran pada dinas perhubungan Kota Pekanbaru dijelaskan pada pasal 4 susunan Organisasinya terdiri dari :

1. Susunan Organisasi UPT. Perparkiran terdiri dari :
 - a. Kepala UPT. Perparkiran
 - b. Kasubbag TU
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan susunan Organisasi UPT. Perparkiran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

UPT Perparkiran, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala UPT. Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan dibidang perhubungan Sub urusan Pengelolaan Parkir.
2. Kepala UPT. Perparkiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran berbagai kawasan diwilayah kota pekanbaru.
 - b. Pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.
 - c. Pelaksanaan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.
 - d. Pelaksanaan tugas bersama dengan perangkat kerja atau instansi terkait dalam pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran.
 - e. Pelaksanaan pengupayaan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran

- f. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan parkir.
- g. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kendaraan bermotor yang menggunakan jasa parkir
- h. Pengaturan pelaksanaan mekanisme pungutan retribusi parkir
- i. Pelaksanaan penyerahan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah
- j. Pelaksanaan pembuatan dan penyampaian laporan hasil operasional penyelenggaraan parkir
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya

D. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dimana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu : melaksanakan sebagian uraian pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dibidang perhubungan. Berikut ini dapat dilihat struktur organisasi dinas perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru beserta tugasnya masing-masing yaitu :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan , komunikasi dan informatika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mengkoordinasi sekretaris, kepala bidang dan kepala UPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- f. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang perhubungan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada bupati tentang kebijakan yang perlu diambil dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

2. Sekretaris Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kesekretarisan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengkoordinasi para kepala Sub bagaian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.

- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- f. Membuat telaahan staf terhadap berbagai permasalahan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengevaluasi kegiatan kesekretariatan baik pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam urusan kerumah-tanggaan dan perlengkapan, pengelolaan tata usaha keuangan dan kepegawaian serta tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Bidang, Kepala UPT dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

3. Kepala Sub Bagian Umum Mempunyai Tugas

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.
- d. Melaksanakan koordinasi antar sub bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- e. Melaksanakan inventarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan pengelolaan barang, kerumahtanggan dan perlengkapan serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melaksanakan kegiatan kerumahtanggan dan perlengkapan, pengelolaan barang, urusan surat-menyurat dan kearsipan serta

melakukan tugas-tugas keprotokolan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian dan perawatan barang-barang atau asset-aset milik daerah dilingkungan dinas serta menyiapkan bahan usulan barang-barang milik daerah yang ada dilingkungan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Melaksanakan penataan, keamanan dan penertiban lingkungan kantor agar tercipta suasana lingkungan yang nyaman dan terkendali.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.
- d. Melaksanakan koordinasi antar sub bagian agar terjalan kerjasama yang baik dan saling mendukung.

- e. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan kegiatan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan urusan piñata usaha keuangan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baik.
- g. Mengkompilasi pertanggungjwaban penggunaan anggaran dan masing-masing bidang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Mempunyai Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian kepegawaian sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.
- d. Melaksanakan koordinasi antar sub bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- e. Melaksanakan absensi terhadap kehadiran pegawai baik absensi harian maupun absensi khusus sesuai dengan petunjuk atasan.

- f. Melaksanakan inventarisasi, pendataan dan penataan arsip dan dokumen kepegawaian sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan, struktur organisasi, uraian tugas, menyiapkan DUK,DSP, mengkompilasi DP3 dari masing-masing pegawai serta menyusun laporan dan usulan kepegawaian lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

6. Kepala Sub Bagian Lalu Lintas Mempunyai Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang lalu lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengkoordinasi kepala seksi agar terjalan kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mendistribusikan Tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.

- f. Melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

7. Kepala seksi manajemen lalu lintas mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi manajemen lalu lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengevaluasi dan menilai hasil bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- d. Melaksanakan koordinasi antar seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- e. Melaksanakan manajemen lalu lintas di jalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan penelitian dan melaporkan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan yang menjadi isu dikabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Melaksanakan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

8. Kepala Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu lintas Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi keselamatan dan ketertiban lalu lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- d. Melaksanakan koordinasi antar seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.

- e. Mengawasi dan mengendalikan operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap Perda Tentang LLAJ, persyaratan teknis dan hak jalan, ketentuan pengujian berskala dan perizinan angkutan umum sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

9. Kepala seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:

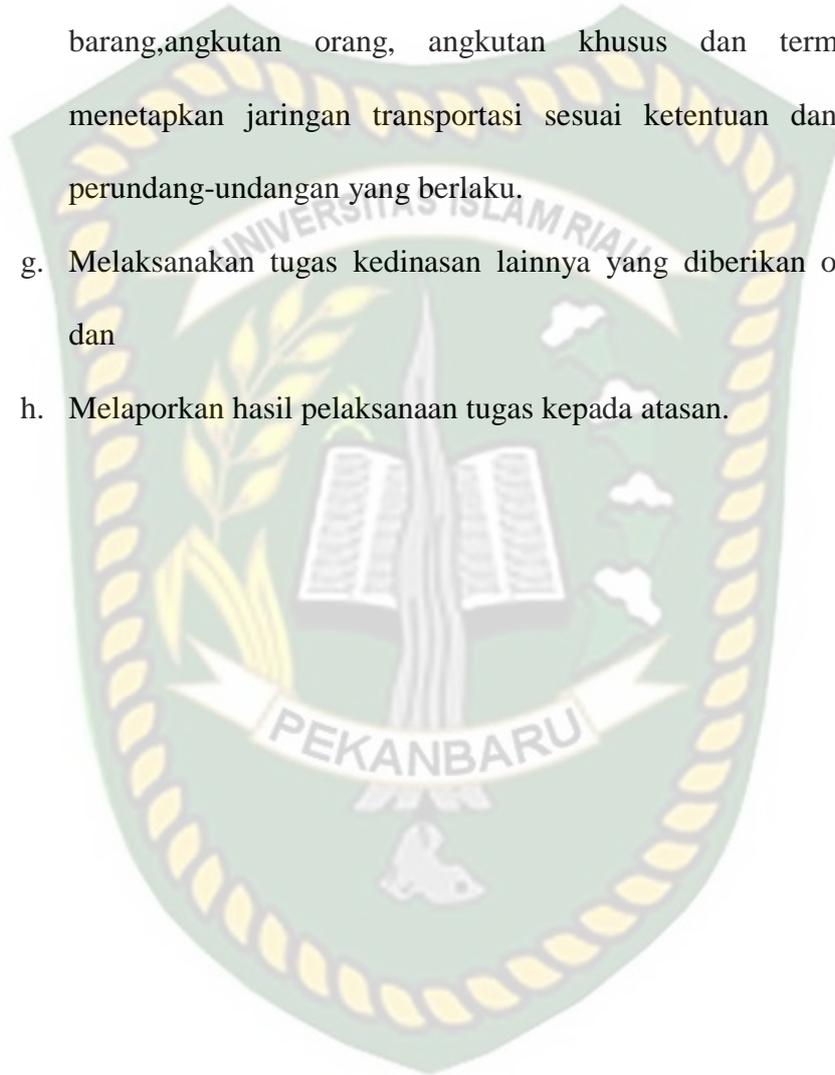
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.

- d. Melaksanakan koordinasi antar seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- e. Menyusun dan mendapatkan kelas jalan pada jaringan jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta pendukung di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Melaksanakan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

10. Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang angkutan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Mengkoordinasi kepala seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.

- e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- f. Menyelenggarakan penetapan jaringan pelayanan angkutan barang, angkutan orang, angkutan khusus dan terminal serta menetapkan jaringan transportasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam peran dinas perhubungan kota pekanbaru membina petugas parkir peneliti mengambil data yang dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan dengan menggunakan alat pengumpulan data baik kuisioner, wawancara dan observasi yang pertama data mengenai identitas responden penelitian dan hasil jawaban responden yang didapatkan dalam penelitian ini memberikan gambaran dari responden penelitian ini, akan dipaparkan sebagai berikut.

A. Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian terhadap seluruh responden yang digunakan sebagai sampel, maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner serta wawancara dan observasi yang akan dijelaskan pada bab ini.

Identitas responden berguna untuk mengetahui berapa banyak responden, jenis kelamin, usia dan pendidikan, hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi responden yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat lebih memperjelas mengenai hasil penelitian. Untuk jelasnya identitas responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Tingkat Pendidikan Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran kuisioner dan wawancara kepada responden, langkah awal yang harus dipenuhi adalah mengetahui identitas responden. Dimana yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat

pendidikan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tingkat pendidikan responden yang mengisi angket dapat diketahui dari tabel berikut ini :

Tabel V.1 Distribusi Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SD	15	33%
SMP	9	20%
SMA	20	43%
S1	2	4%
Jumlah	46	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Pada tabel V.1 dapat dilihat bahwa jumlah pendidikan responden yang berpendidikan SD yang berjumlah 15 orang atau 33%, selanjutnya SMP berjumlah 9 orang atau 20% dan SMA yang berjumlah 20 orang atau 43%, dan pendidikan S1 yang berjumlah 2 orang atau 4%. Dengan demikian dari tingkat pendidikan yang bermacam-macam ini akan mampu memberikan jawaban tentang Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir.

2. Tingkat Umur Responden

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Adapun tingkat umur responden pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase(%)
1.	<20 Tahun	-	-
2.	21-30 Tahun	4	9%
3.	31-40 Tahun	12	26%
4.	>41 Tahun	30	65%
Jumlah		46	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun. 2019

Berdasarkan Tabel V.2 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden berada pada tingkat umur 21-30 tahun yakni sebanyak 4 orang atau 9%, pada tingkat umur 31-40 Tahun yakni sebanyak 12 orang atau 26%, dan pada tingkat umur >41 tahun yakni sebanyak 30 orang atau 65%.

3. Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas responden ini juga akan memuat jenis kelamin dari responden. Hal ini sesungguhnya tidak akan berpengaruh besar terhadap analisa data, namun dinilai perlu untuk kelengkapan data responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yaitu :

Tabel V.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1.	Laki-Laki	34	74%
2.	Perempuan	12	26%
Jumlah		46	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui sebagian besar jenis kelamin laki-laki sebanyak 34 orang atau sekitar 74%, dan kemudian jenis kelamin perempuan sebanyak 12 orang atau sekitar 26%.

B. Hasil Penelitian Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir

Dinas Perhubungan (Dishub) dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan :

- a. Lalu lintas kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan ditempat parkir.
- b. Penyerahan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa pelayanan parkir.
- c. Pengaturan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang diparkir.

Peranan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota pekanbaru dalam menyelenggarakan perparkiran terutama dalam memberikan pelayanan parkir kepada masyarakat kurang memuaskan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang berpendapat sedemikian bahwa banyaknya petugas parkir yang tidak memberikan karcis kemudian masyarakat yang mengatur parkir sendiri.

Untuk mengetahui Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut ini :

1. Indikator Bimbingan

Pemberian bimbingan adalah bantuan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan atau kepada beberapa orang individu agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan lebih mandiri dalam memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Setelah mengumpulkan data mengenai

bimbingan dalam membina petugas parkir maka didapatkan hasil dari kuesioner yang disebar pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Petugas Parkir mengenai Bimbingan

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pemberian Petunjuk	4	7	9	20
2.	Pemberian Masukan	5	10	5	20
Jumlah		9	17	14	40
Rata-rata		5	8	7	20
Persentase		25%	40%	35%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian,2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hal tanggapan responden yang menyatakan untuk indikator bimbingan yang dinilai pada item penilaian pertama yaitu pemberian petunjuk yang dilakukan UPTD Perparkiran kepada petugas parkir dikategorikan kurang baik dengan jawaban responden 11 orang. Adanya observasi yang penulis lakukan terhadap pemberian petunjuk yang dilakukan Kepala UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) kepada petugas parkir tidak terlaksananya penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melakukan penderekan, dan tidak adanya pengupayaan standar pelayanan minimal berupa menjaga keamanan dan ketertiban pada kegiatan perparkiran. Pada item kedua yaitu pemberian masukan yang dilakukan UPTD Perparkiran kepada petugas parkir dikategorikan cukup baik dengan jawaban responden 10 orang. Adanya observasi yang penulis lakukan terhadap pemberian masukan yang dilakukan kepala UPTD Perparkiran kepada petugas parkir yaitu setiap petugas parkir membuat dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan

perparkiran. Dengan demikian kesimpulan sementara atas peranan dinas perhubungan Kota Pekanbaru dalam membina petugas parkir bisa dikatakan cukup baik atau sama dengan 40% dari keseluruhan jawaban responden yang berjumlah 20 orang.

Wawancara yang penulis lakukan pada hari senin, 14 Oktober 2019 pukul 14:30 dengan Bapak Nasir,SH sebagai KASUBBAG TU UPTD Perparkiran dimana dikatakan bahwa pemberian petunjuk dan masukan yang diberikan seperti menjaga keamanan, ketertiban ditempat parkir, membantu dan memandu pengemudi masuk dan keluar kendaraannya dari tempat parkir terhadap petugas parkir maupun juru parkir. Namun pihaknya mengakui masih adanya tidak maksimalan pada petugas parkir, juru parkir maupun masyarakat pengguna parkir dalam melakukan perparkiran sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan yang ada. Pihaknya telah berupaya memberikan sosialisasi agar pemahaman petugas parkir, juru parkir dan masyarakat pengguna parkir bahwa kawasan parkir telah ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan bahwa masih banyaknya petugas parkir yang tidak memberitahu kepada juru parkir mengenai lahan yang seharusnya digunakan untuk menjadi tempat parkir dengan demikian juru parkir masih memakai trotoar atau memakan separoh jalan raya untuk lokasi parkir. Dan masih belum adanya sosialisasi yang dilakukan petugas parkir kepada juru parkir mengenai menjaga keamanan dan ketertiban saat menjalankan tugasnya. Dari hal tersebut, terlihat bahwa sebelum UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Perparkiran turun kelapangan untuk melakukan bimbingan terhadap petugas parkir maupun juru parkir UPTD Perparkiran telah membentuk tim dimana setiap kegiatan bimbingan harus direncanakan terlebih dahulu agar

mempunyai tujuan yang nyata terhadap yang dilakukan benar-benar berguna dengan baik. Sehingga data jawaban responden terkait bimbingan dapat berperan kembali hasilnya untuk dipergunakan lagi dalam pemberian petunjuk dan masukan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden atau tanggapan responden masyarakat pengguna parkir yang berjumlah 24 orang responden terhadap indikator bimbingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel V.5 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Masyarakat sebagai Pengguna Parkir

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pemberian Petunjuk	4	9	11	24
2.	Pemberian Masukan	6	7	11	24
Jumlah		10	16	22	48
Rata-rata		5	8	11	24
Persentase		21%	33%	46%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil dari seluruh tanggapan responden yang mewakili masyarakat lainnya dalam penelitian ini, bahwa yang menyatakan untuk indikator bimbingan yang dinilai pada data dan penjelasan tabel V.5 diatas, dapat dilihat kesimpulannya bahwa bimbingan suatu pemberian petunjuk dan masukan yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan terdapat masyarakat dapat dikategorikan kurang baik atau sama dengan 46% dari keseluruhan tanggapan atau jawaban responden pada masyarakat yang berjumlah 11 orang.

Hal ini dilihat berdasarkan hasil kuisioner dan dari hasil tanggapan responden yang disampaikan kepada penulis bahwa dapat dilihat dalam pemberian petunjuk dan masukan kurang baik dikarenakan masih banyaknya petugas parkir yang tidak mengetahui tugasnya dilapangan dalam menjaga keamanan, ketertiban ditempat parkir,serta kurang membantu dan memandu pengemudi masuk dan keluar kendaraannya. Masyarakat hanya diberikan teguran selama proses memarkirkan kendaraan. Setelah proses pemberian bimbingan yang dilakukan, petugas parkir mulai tidak teratur sebagaimana yang telah direncanakan oleh dinas perhubungan kota Pekanbaru.

Wawancara dengan salah satu seorang masyarakat pada hari sabtu,19 oktober 2019 pukul 10:00, bernama Novira yang melakukan parkir pada kawasan perparkiran, mengatakan bahwa “masyarakat juga menyadari bahwa masih adanya kelemahan terhadap perparkiran. Jika masyarakat telah memarkirkan kendaraannya berdasarkan tempat kendaraan perparkiran, masih adanya petugas parkir yang tidak bertanggung jawab terhadap perparkiran, dan masih banyaknya petugas parkir yang tidak menggunakan atributnya”.

Dengan adanya observasi yang dilakukan penulis terhadap kawasan perparkiran, juga memperkuat apa yang dikatakan masyarakat terhadap perparkiran pada kawasan perparkiran yang dilakukan peneliti selama sebulan penuh berturut-turut melakukan riset dikawasan perparkiran tepatnya pada lokasi Jalan Tuanku Tambusai, dimana pada kawasan perparkiran khusus yang telah ditentukan sebagai kawasan perparkiran. Hal ini tidak terlihat adanya

pengendalian yang tegas dan sanksi yang jera dilakukan oleh petugas parkir untuk melakukan petunjuk pada kawasan parkir. Petugas memang ada melakukan turun kelapangan melakukan bimbingan untuk memberikan petunjuk dan masukan, tetapi untuk memberikan sanksi yang tegas tidak ada dilakukan pihaknya.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Bimbingan terhadap perparkiran yang ada dilapangan kurang berjalannya secara baik. Hal ini terlihat karena dari hasil atau akibat yang diharapkan dilapangan belum maksimal dapat diwujudkan dalam pelaksanaannya, pihaknya mengalami kesulitan memberikan petunjuk baik kepada petugas parkir, koordinator parkir maupun kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraan.

Dengan demikian, melalui dari beberapa item penilaian yang dilihat berdasarkan jawaban dan tanggapan responden dapat diambil kesimpulan bahwa petunjuk dan masukan yang diberikan berkategori Kurang Baik.

2. Indikator Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Setelah mengumpulkan data mengenai pengawasan yang diberikan oleh pihak dinas perhubungan kepada petugas parkir maka didapatkan hasil dari kuissioner yang disebar pada tabel dibawah ini :

Tabel V.6 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Petugas Parkir Mengenai Pengawasan

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menentukan Ukuran/pedoman	5	7	8	20
2.	Mengawasi kegiatan	7	9	4	20
Jumlah		12	16	12	40
Rata-rata		6	8	6	20
Persentase		30%	40%	30%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hal tanggapan responden yang menyatakan untuk indikator pengawasan yang dinilai pada item penilaian pertama yaitu menentukan pedoman yang dilakukan UPTD Perparkiran kepada petugas parkir dikategorikan kurang baik dengan jawaban responden 8 orang. Adanya observasi yang penulis lakukan terhadap menentukan pedoman yang dilakukan Kepala UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) belum maksimalnya pedoman yang diberikan kepada petugas parkir berupa tidak adanya buku panduan tentang tata cara pemungutan retribusi parkir, tupoksi yang berhubungan dengan tugas juru parkir.

Pada item kedua yaitu mengawasi kegiatan yang dilakukan UPTD Perparkiran kepada petugas parkir dikategorikan cukup baik dengan jawaban responden 9 orang. Adanya observasi yang penulis lakukan pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan Kota Pekanbaru dilakukan setiap hari berupa patrol keliling oleh tim dengan mendatangi juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan demikian kesimpulan sementara atas peranan dinas perhubungan Kota

Pekanbaru dalam membina petugas parkir bisa dikatakan cukup baik atau sama dengan 40% dari keseluruhan jawaban responden yang berjumlah 20 orang.

Wawancara yang penulis lakukan pada hari senin, 14 Oktober 2019 pukul 14:30 dengan Bapak Nasir,SH sebagai KASUBBAG TU UPTD Perparkiran dimana dikatakan bahwa pengelolaan perparkiran melakukan pengawasan setiap hari berupa patrol keliling oleh tim yang telah ditentukan dengan mendatangi juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil obesrvasi peneliti yang dilakukan bahwa juru parkir mengatakan ada pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran tetapi tidak dilakuakn setiap hari dan belum optimalnya pengawasan dari UPTD Perparkiran sehingga juru parkir merasa kurang diperhatikan dan keluhan mereka dilapangan tidak ditanggapi.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden masyarakat pengguna jasa parkir yang berjumlah 24 orang responden terhadap Indikator pengawasan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel V.7 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Masyarakat sebagai Pengguna Parkir

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menentukan Ukuran/pedoman	8	14	2	24
2.	Mengawasi kegiatan	6	12	6	24
Jumlah		14	26	8	48
Rata-rata		7	13	4	24
Persentase		29%	54%	17%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil dari keseluruhan tanggaopan responden yang mewakili masyarakat lainnya dalam penelitian ini, bahwa yang menyatakan untuk indikator pengawasan yang dinilai dari data dan penjelasan tabel V.7 diatas, dapat dilihat kesimpulannya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran terhadap masyarakat dapat dikategorikan Cukup Baik atau sama dengan 54% dari keseluruhan tanggapan atau jawaban responden pada masyarakat yang berjumlah 13 orang.

Wawancara dengan salah satu seorang masyarakat pada hari sabtu 19 oktober 2019 pukul 09:30 bernama bapak Sutono yang melakukan parkir pada kawasan perparkiran, mengatakan bahwa: “pengawasan yang diberikan bisa terlaksana dengan baik apabila pemerintah mampu menangani masyarakat yang memarkirkan kendaraanya berdasarkan kapasitas kecukupan muatan perparkiran bagi masyarakat. Sehingga dapat mempermudah masyarakat melakukan perparkiran berdasarkan perparkkran masyarakat yang parkir tepi jalan umum telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Selain itu, masyarakat mengatakan bahwa apabila batasan perparkiran penuh, malah juru parkir tersebut yang menyuruh berparkir pada rambu larangan parkir ataupun yang tidak sesuai dengan batasan kendaraan perparkiran.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan penulis terhadap pemberian pedoman atau ukuran dan mengawasi kegiatan yang dilakukan peneliti, terlihat masih sebagian yang belum terlaksana dengan baik masih adanya masyarakat yang mengeluh bahwa tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang tertera

dikarcis sering dijumpai diberbagai tempat serta pelayanan dari juru parkir yang tidak transparan, datang disaat pelanggan akan keluar parkir dan mengilang saat pelanggan memarkirkan kendaraan.

Dengan adanya observasi yang dilakukan penulis terhadap petugas parkir juga memperkuat apa yang dikatakan masyarakat terhadap petugas parkir yang dilakukan oleh peneliti selama satu bulan dalam melakukan riset terhadap pengawasan yang diberikan petugas parkir, hal ini terlihat dengan masih adanya sebagian dari tugas UPTD Perparkiran yang hanya sebagian yang dapat terlaksana dalam menjalankan tugasnya memberikan pedoman dan pengawasan dan sanksi yang tegas dan jera untuk melakukan pengawasan dilokasi.

3. Indikator Pengarahan

Pengarahan yaitu upaya yang dilakukan dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada seseorang atau sekelompok orang. Untuk mengetahui tanggapan responden yang berasal dari hasil penelitian berdasarkan indikator pengarahan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Petugas Parkir mengenai Pengarahan

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menggerakkan/ memberikan arahan	7	7	6	20
2.	Memberikan langkah-langkah	5	8	7	20
Jumlah		12	15	13	40
Rata-rata		6	8	6	20
Persentase		30%	40%	30%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil dari seluruh tanggapan responden menyatakan untuk indikator pengarahan yang dinilai pada item pertama yaitu memberikan arahan yang mengatakan baik 7 orang, cukup baik 7 orang dan kurang baik 6 orang. Pada item pertama ini UPTD Perparkiran memberikan arahan kepada petugas parkir maupun juru parkir berupa menata parkir yang benar, menjaga ketertiban dan keamanan saat bertugas. Item penilaian kedua yaitu memberikan langkah-langkah yang mengatakan baik 5 orang, cukup baik 8 orang dan kurang baik 7 orang langkah-langkah yang diberikan seperti tidak adanya lagi pengguna parkir yang memarkirkan kendaraannya disepanjang jalan raya. Dengan demikian kesimpulan sementara bisa dikatakan cukup baik atau sama dengan 40% dari hasil keseluruhan responden 20 orang.

Hasil wawancara penulis pada hari senin,14 oktober 2019 pukul 14:30 WIB dengan bapak Nasir,SH selaku Kasubbag TU UPTD Perparkiran mengatakan bahwa : upaya yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara memberi motivasi atau dorongan, memberikan arahan ataupun bimbingan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti setiap petugas parkir menyetorkan retribusi parkir, membuat laporan retribusi parkir setiap bulan.

Berdasarkan Hasil observasi peneliti dalam menggerakan atau memberikan arahan yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dikatakan cukup baik dilihat dari setiap kegiatan seperti memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat kota pekanbaru dengan selalu ramah

dan sigap untuk membantu mengeluarkan kendaraan dan juga membantu menyebrangi pengguna parkir.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden terhadap responden masyarakat pengguna jasa parkir yang berjumlah 24 orang responden terhadap indikator pengarahannya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel V.9 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Masyarakat sebagai Pengguna Parkir

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menggerakkan/ memberikan arahan	3	14	7	24
2.	Memberikan langkah-langkah	6	12	6	24
Jumlah		9	26	13	48
Rata-rata		4	13	7	24
Persentase		17%	54%	29%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil dari seluruh tanggapan responden yang mewakili masyarakat lainnya dalam penelitian ini, bahwa yang menyatakan untuk indikator pengarahannya yang dinilai dari data dan penjelasan tabel V.9 diatas, dapat dilihat kesimpulannya bahwa pengarahannya terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan petugas parkir pada masyarakat dapat dikategorikan Cukup Baik atau sama dengan 54% dari keseluruhan tanggapan atau jawaban responden masyarakat pengguna jasa parkir .

Wawancara dengan salah satu seorang masyarakat pada hari senin, 22 oktober 2019 pukul 13:00 bernama ibu Sri yang melakukan parkir pada kawasan perparkiran, mengatakan bahwa : saya sebagai masyarakat juga

menyadari bahwa masih adanya kelemahan terhadap perparkiran. Jika masyarakat telah memarkirkan kendaraannya berdasarkan tempat kendaraan perparkiran, masih adanya petugas parkir yang tidak bertanggung jawab terhadap perparkiran.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan penulis terhadap pemberian arahan dan langkah-langkah yang dilakukan peneliti, terlihat masih sebagian yang belum terlaksana dengan baik masih adanya masyarakat yang mengeluh bahwa tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang tertera dikarcis sering dijumpai diberbagai tempat serta pelayanan dari juru parkir yang tidak transparan, datang disaat pelanggan akan keluar parkir dan mengilang saat pelanggan memarkirkan kendaraan.

Dengan adanya observasi yang dilakukan penulis terhadap petugas parkir juga memperkuat apa yang dikatakan masyarakat terhadap petugas parkir yang dilakukan oleh peneliti selama satu bulan dalam melakukan riset terhadap pengarahan yang diberikan petugas parkir.

4. Indikator Pelatihan

Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawab atau yang ada kaitan dengan pekerjaannya. Setelah mengumpulkan data mengenai pelatihan yang diberikan oleh pihak dinas perhubungan kepada petugas parkir maka didapatkan hasil dari kuissioner yang disebar pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Petugas Parkir Mengenai Pelatihan

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Meningkatkan kemampuan	4	6	10	20
2.	Meningkatkan Keterampilan	8	9	3	20
Jumlah		12	15	13	40
Rata-rata		6	8	6	20
Persentase		30%	40%	30%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil dari tanggapan atau seluruh jawaban responden yang mewakili petugas parkir lainnya dalam penelitian ini, bahwa yang menyatakan untuk indikator pelatihan yang dinilai dari data dan penjelasan tabel V.10 diatas,dapat dilihat kesimpulannya bahwa pelatihan yang diberikan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran kepada petugas parkir dapat dikategorikan Cukup Baik atau sama dengan 40% dari keseluruhan tanggapan atau jawaban responden pada petugas parkir yang berjumlah 8 orang.

Hasil wawancara penulis pada hari senin, 14 Oktober 2019 pukul 14:30 WIB dengan Bapak Nasir,SH selaku Kasubbag TU UPTD Perparkiran mengatakan cara meningkatkan kemampuan ataupun keterampilan seorang petugas parkir yaitu dengan melayani masyarakat pengguna parkir dengan baik dan benar, mempunyai etika dan mengetahui peraturan perparkiran ditepi jalan umum, berdisiplin dalam hal keseragaman menggunakan tanda pengenal atribut petugas seperti surat perintah resmi dari dinas

perhubungan, id card, rompi, pluit dan juga pengguna karcis yang selama ini telah kita bekali.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam meningkatkan kemampuan dan meningkatkan keterampilan belum terlihat jelas seperti masih adanya petugas parkir yang tidak mengarahkan dan memberikan pelatihan kepada juru parkir mengenai retribusi parkir sehingga banyaknya pengguna parkir yang merasa ngeluh saat diminta tarif parkir yang tidak sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan tidak adanya karcis yang diberikan kepada pengguna parkir.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden atau tanggapan responden masyarakat pengguna parkir yang berjumlah 24 orang responden terhadap indikator bimbingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel V.11 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Masyarakat Sebagai Pengguna Parkir

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Meningkatkan kemampuan	6	9	9	24
2.	Meningkatkan Keterampilan	-	13	11	24
Jumlah		6	22	20	48
Rata-rata		3	10	11	24
Persentase		12%	42%	46%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil dari seluruh tanggapan responden yang mewakili masyarakat lainnya dalam penelitian ini, bahwa yang menyatakan untuk indikator pengarahan yang dinilai dari data dan penjelasan tabel V.11 diatas, dapat dilihat kesimpulannya bahwa pengarahan terhadap pelaksanaan tugas

yang dilakukan petugas parkir pada masyarakat dapat dikategorikan Kurang Baik atau sama dengan 46% dari keseluruhan tanggapan atau jawaban responden masyarakat pengguna jasa parkir.

Dari semua hasil penjelasan menurut responden masing-masing indikator diatas, maka selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi keseluruhan jawaban dari petugas parkir untuk mengetahui peranan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam membina petugas parkir pada tabel rekapitulasi dibawah ini :

Tabel V.12. Rekapitulasi Jawaban Responden Petugas Parkir mengenai Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Bimbingan	5	8	7	20
2.	Pengawasan	6	8	6	20
3.	Pengarahan	4	8	6	20
4.	Pelatihan	6	8	6	20
Jumlah		23	32	25	80
Rata-rata		6	8	6	20
Persentase		30%	40%	30%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan rekapitulasi data diatas tentang jawaban responden yang diperoleh dari keseluruhan petugas parkir dapat disimpulkan bahwa untuk indikator variabel dari peranan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam membina petugas parkir ialah kategori Cukup baik dengan rata-rata 8 atau 40% dari keseluruhan responden penelitian.

Hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator-indikator yang ada pada tabel diatas masih adanya kelemahan-kelemahan yang dilakukan UPTD Perparkiran kepada petugas parkir, juru parkir maupun pengguna parkir seperti telah terlaksananya pembinaan yang dilakukan UPTD Perparkiran kepada petugas

parkir tetapi petugas parkir belum melakukan pembinaan dilapangan secara langsung kepada juru parkir.

Kemudian untuk rekapitulasi responden masyarakat pengguna jasa parkir dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel V.13. Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat sebagai pengguna jasa parkir

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Bimbingan	5	8	11	24
2.	Pengawasan	7	13	4	24
3.	Pengarahan	4	13	7	24
4.	Pelatihan	3	10	11	24
Jumlah		19	44	33	96
Rata-rata		5	11	8	24
Persentase		21%	46%	33%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Dari tabel V.13 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk keseluruhan indikator variabel dari peranan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam membina petugas parkir ialah kategori Cukup baik dengan rata-rata 11 atau 46% dari keseluruhan responden penelitian.

Maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya penilaian terhadap peranan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam membina petugas parkir dikatakan Cukup Baik. Kesimpulan ini sesuai dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan memang masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan baik oleh petugas parkir ataupun pengguna jasa parkir, sehingga dari keseluruhan tanggapan responden dapat disimpulkan hasil

penelitian mengenai peranan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam membina petugas parkir dalam kategori Cukup Baik.

C. Hambatan Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam membina Petugas Parkir

Setelah melakukan penelitian mengenai peranan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam membina petugas parkir diketahui bebrapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain :

- a. Kurangnya pengembangan dan bimbingan teknis dari dinas perhubungan kota pekanbaru secara langsung terhadap petugas parkir dan pengguna jasa parkir.
- b. Kurangnya kegiatan sosialisasi program pembinaan perparkiran dan mengenai peraturan tentang perparkiran yang diberikan dinas perhubungan kota pekanbaru kepada petugas parkir dan pengguna parkir.
- c. Belum adanya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan terhadap koordinator ataupun petugas parkir.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa peranan dinas perhubungan Kota Pekanbaru dalam membina petugas parkir sudah cukup berperan dalam membina petugas parkir.

Maka ada beberapa Hambatan yang belum dapat dicapai atau terwujudnya dengan baik yang dilihat dari kesimpulan faktor penghambat secara garis besarnya dalam hasil penelitian ini mengenai Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Membina Petugas Parkir yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan dan bimbingan teknis dari dinas perhubungan kota pekanbaru secara langsung terhadap petugas parkir dan pengguna jasa parkir.
- b. Kurangnya kegiatan sosialisasi program pembinaan perparkiran dan mengenai peraturan tentang perparkiran yang diberikan dinas perhubungan kota pekanbaru kepada petugas parkir dan pengguna parkir.
- c. Belum adanya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan terhadap koordinator ataupun petugas parkir.

B. Saran

Adapun saran penulis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,petugas parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah lebih teliti dan bijaksana dalam memilih petugas parkir
2. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat memberikan pelatihan kepada koordinator maupun petugas parkir
3. Adanya penegasan kepada petugas parkir bahwa lahan yang dipakai untuk parkir adalah lahan yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Penerbit Alfabeta
- Ali, Zaini, 2015. *Teori kebijakan Publik*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh Publishing
- Awang, Azam dan Wijaya, Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru. Alaf Riau.
- Napitupulu, Paimin, 2012. *Seri ilmu pemerintahan – pelayanan public & costumer satisfaction*, Bandung, PT.Alumni.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Metodology Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Santoso, 2005. *Pembinaan dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Sedarmayanti, 2009, *reformasi administrasi public, reformasi birokrasi dan kepemimpinan masadepan (mewujudkan pelayanan prima dan kepemimpinan yang baik)*, Bandung, RefikaAditama.
- Sianipar, J.P.G 1995. *Manajemen pelayanan Publik*. Jakarta : LAN
- Sugiyono, 2009. *Metodologi Penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Sumaryadi, Nyoman. 2010. *Sosiologi pemerintahan*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Supriyanto, dkk. 2009. *Manajemen Pemerintahan (plus dua belas langkah strategi)* media Brilian. Tangerang.
- Suharto, Edi, 2015. *Analisis kebijakan publik*. Bandung, penerbit Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta. Rajawali grafindo persada

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sitem administrasy public Negara Indonesia (SANKRI)*. Jakarta. Bumi Aksara

Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Aditama

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta

Thoha, Miftah, 2003. *Pembinaan organisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wijaya, HA W. 2012. *Otonomi Desa Merpakan Otonomi yang asli bulat dan Utuh*. Jakarta. Rajawali pers.

SKRIPSI/JURNAL

Riko, 2017. Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Pengelolaan Parkir (Studi Di Kota Bangkinang). Universitas Islam Riau

Jefri, Muhammad, 2017. Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Dikota Pekanbaru. Skripsi: UIR

Dwimas, Arbianto, 2017. Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Penertiban Parkir. Skripsi : UIR

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru